



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN UMKM DI KAWASAN SUPER PRIORITAS NASIONAL (KSPN) LABUAN BAJO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Angga Sulaiman¹; Mary Ismowati^{2*}; Cyntia Dewi Anggraini³; Anisa Hairani⁴; Ares Wahyu Triadi⁵; Rifa Arifiananingtyas⁶; Bambang Prabowo⁷.

^{1,2,3,4,5,6,7} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta
angga.sulaiman@civitas.unas.ac.id; cyntiadewi@civitas.unas.ac.id; anisahairani48@gmail.com;
areswahyu27@gmail.com.

ARTICLE INFORMATION

Received: August 10th, 2022
Revised: September 28th, 2022
Accepted: November 20th, 2022
Available online: December 25th, 2022

KEYWORDS

pemberdayaan masyarakat, umkm, labuan bajo

ABSTRACT

Labuan Bajo National Tourism Strategic Area (KSPN) is an area that has the main function as a tourism destination or has the potential for national tourism development that has an important influence in one or more aspects, such as economic, social and cultural growth. As a super-priority tourist area, local creative actors in the community and especially MSME actors are expected to be empowered. A qualitative approach is used in this study because it aims to understand community empowerment in developing MSMEs at KSPN Labuan Bajo. As a source of data on the phenomenon under study, interviews with informants were conducted. FGDs were also conducted with stakeholders. From the results of the study, there are several things that can be concluded, including the central government, namely the Kemenkoparekraf and local governments, the Department of Manpower, Transmigration, Cooperatives and SMEs, Kab. West Manggarai through Perumda Bidadari has made efforts to empower the community in the development of SMEs in Labuan Bajo City, West Manggarai Regency, but it has not been maximized because the number of SMEs assisted is only small. This is because of the limited budget and human resources in the government. Factors that influence the development of SMEs in Labuan Bajo City include aspects: capital, mentoring, marketing distribution, financial aspects, and human resources. SMEs actors must have sufficient, so that the businesses they manage are able to develop and compete with other businesses and provide benefits to the local community in the tourist area of KSPN Labuan Bajo. The main obstacle for the government in implementing SME development is budget constraints. The government relies on the APBD for all budgetary needs, so training and coaching programs must be adjusted to the funding capacity of the West Manggarai district government.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) adalah salah satu upaya alternatif pemerintah untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan hal terpenting sebagai penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM akan berdampak kepada kemajuan bagi perekonomian suatu negara. Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah, lembaga – lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peranan pemerintah disini adalah memutuskan kebijakan – kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan disini jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha itu sendiri memiliki peranan pokok bagi perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi kegiatan masyarakat ikut terlibat dalam program pemerintah (Adhi,2019). Pemberdayaan masyarakat diartikan dalam bentuk partisipasi yang bermakna kegiatan-kegiatan tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan program, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kemajuan pengembangan masyarakat tersebut. Mardikanto and Soebiato (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi, sosial dan produksi secara berkesinambungan. Collins, et al., (2017) yang dikutip Asep Parantika (2020) bahwa dalam pembangunan berkelanjutan adalah penting untuk membuat perencanaan yang terintegrasi melibatkan semua pihak dalam pembuatan kebijakan .

Kriteria UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha di semua sektor ekonomi. Secara prinsip, perbedaan diantara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. (Tulus , 2012)

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM ini mempunyai Daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Dari sisi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. (web Kemenkeu, 2020). UMKM ini didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% yang mempunyai daya



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Hal ini berarti, dari 64 juta pelaku UMKM, mereka memiliki kontribusi relatif kecil terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak mengandalkan keunggulan lokal yang dimiliki. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong supaya potensi lokal dapat dioptimalkan, dan supaya tidak menjadi "tamu di daerah sendiri". UMKM mengambil peranan untuk bangkit dan memanfaatkan peluang tersebut.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian salah satunya dengan mengembangkan pariwisata. Karena sektor pariwisata adalah sektor yang paling cepat pulih setelah masa pandemi ini. Pengembangan pariwisata memberikan efek berganda pada sektor lainnya, salah satu efek yang terlihat melalui instrumen peningkatan devisa. Untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia presiden menginstruksikan untuk fokus dalam pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas pengembangan destinasi baru dikenal dengan Bali baru, yaitu Labuan Bajo, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Borobudur. Upaya pemerintah fokus untuk mengembangkan bukan hanya dari infrastrukturnya, tapi juga dari sisi ekonomi kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021). Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. KSPN ditetapkan berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Di dalam 50 DPN tersebut terdapat 88 titik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pengelolaan 5 kawasan wisata super prioritas (KSPN) dikelola oleh sebuah Badan Otorita. Demikian Badan Otoritatif Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF), merupakan badan yang secara khusus diberikan kewenangan pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Dibentuknya Badan Otorita Pelaksana dalam rangka optimalisasi dan mempercepat pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Asian Summit dan G20 meeting akan digelar di Labuan Bajo pada tahun 2023, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan momen tersebut untuk bisa terkoneksi dengan pasar global dan mengambil peran, bukan sekedar menjadi penonton. Ada 5 fokus sektor produk UMKM yang harus dioptimalkan, mulai dari supply kebutuhan hotel, *homestay*, wisata alam, kuliner dan *merchandise*. Komunitas kreatif muda Labuan Bajo terbentuk, akan meningkatkan posisi tawar pelaku UMKM Labuan Bajo. Apalagi Labuan Bajo adalah kawasan wisata super prioritas, sehingga pelaku kreatif lokal dapat berdaya dan menjadi tuan rumah di daerahnya



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



sendiri. Ini digerakkan komunitas secara bersama-sama," (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 14 September 2020)

Pengelolaan wisata di Kabupaten Manggarai Barat di bawah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan UKM dan telah dibentuk Perumda Bidadari yang bertugas salah satunya meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam UMKM. Seperti halnya masyarakat Nusa Tenggara Timur lainnya, Labuan bajo yang merupakan masyarakat pedesaan, dimana usaha yang mereka jalankan hanya sebatas dibidang perdagangan, perikanan, dan peternakan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelum penelitian pada beberapa anggota UKM mengatakan bahwa yang menjadi penghambat sulitnya mengembangkan usaha adalah kelemahan dalam perencanaan, sering terjadi kekurangan modal usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola (manajemen) untuk menjalankan usaha sangat kurang. Hal ini menyebabkan tidak banyak UKM yang usahanya berlangsung lama.

Beberapa pelaku UMKM di Manggarai Barat Labuan Bajo makin hari semakin berkembang pesat. Salah satunya didominasi oleh potensi industri pangan dan kerajinan souvenir. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Pemkab. Manggarai Barat telah mengadakan Gerakan 100 Ribu UMKM Online Nasional tahun 2017. UMKM di Labuan Bajo saat ini memang belum berkembang karena faktor transportasi. Untuk melakukan pemasaran produk UMKM semua secara online ada beberapa kendala. Diantaranya tidak semua orang suka berinternet, kendalanya tidak ada sinyal, atau tidak mengetahui istilah dalam dunia online.

Beberapa penelitian tentang UKM di masa pandemi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan UKM di daerah wisata, karena berkurangnya pengunjung (Nur Faidatimu, 2021). Pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan budaya lokal masyarakat setempat dan melibatkan berbagai pihak mulai dari generasi muda (Agustina : 2020).

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut Ife (2006) bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Maulina & Dewi, 2020). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sehingga indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya menurunnya partisipasi, kelemahan koordinasi diantara berbagai pihak dan belum terlaksananya pariwisata berbasis masyarakat (Wibowo dkk., 2015).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya pemberdayaan masyarakat dalam membangun UMKM di Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari pemerintah dalam membangun pemberdayaan masyarakat dalam UMKM bidang pangan dan kerajinan di masa pandemi, upaya pengembangan dan penganggaran, pembangunan UMKM, khususnya pada satuan kerja Perumda Bidadari di Labuan Bajo yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan UMKM di KSPN Labuan Bajo. Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan orang-orang berperan utama (key persons) sebagai sumber data atas fenomena yang diteliti ada 7 informan terdiri dari Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM, Kab. Manggarai barat, Perumda Bidadari dan 4 pelaku UMKM dibidang perajin tenun, makanan ringan, restaurant fast food dan Sanggar



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



seni. Dalam melakukan kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan, dengan melakukan wawancara dan observasi. Untuk melihat respon pemerintah terkait kebijakan dan program Pemberdayaan dan UMKM, dilakukan FGD bersama Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Wawancara dan observasi juga dilakukan terhadap masyarakat lokal dan wisatawan mengenai pariwisata, permasalahan dan partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan di sekitar lokasi wisata, mulai dari pedagang, masyarakat lokal, dan wisatawan. Lokasi wisata berada di di sekitar Water Front City, kawasan Puncak Waringin, dan Pulau Komodo. Penelitian dilakukan dimulai tahap persiapan sejak November 2021 dan studi ke Labuan Bajo pada Maret 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid – 19

Sebelum adanya pandemi pemerintah Kota Labuan Bajo khususnya kabupaten Manggarai Barat melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang diadakan setiap bulannya. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pelatihan dan pembinaan mengalami penundaan dan belum berjalan kembali. Namun Hal tersebut tidak mengurangi terhadap pelaku usaha untuk mengembangkan inovasinya agar tetap bisa melakukan kegiatan usahanya.

Peran Pemerintah Dalam Membangun Ketahanan UMKM Pada Masa Pandemi Covid – 19

Dalam mewujudkan UMKM yang sejahtera perlu adanya dukungan dari pemerintah. Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan daerah. Karena itu tidaklah mengherankan jika kebijakan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja atau kebijakan retribusi pendapatan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UKM di Kota Labuan Bajo akan menghadapi perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim usaha di daerah. Oleh sebab itu, setiap pengusaha UKM yang ada di Kota Labuan Bajo dituntut dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan besar tersebut.

Pada Februari 2022 Perumda Bidadari Kab Manggarai barat telah meluncurkan toko penjualan online dengan nama “Mbaru Darmi”. Ada 100 varian produk UMKM /ekraf yang dapat dipesan online. Sebanyak 180 pelaku UMKM terlibat dalam pameran UMKM yang diselenggarakan oleh DPD Asosiasi Seniman Tari Indonesia (ASETI) NTT di Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT hingga 11 Mei 2022. Berharap para pelaku UMKM tetap semangat dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Pemerintah Kabupaten



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



Manggarai Barat akan terus memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi kreatif di Labuan Bajo khususnya dan Manggarai Barat umumnya.

Pemberdayaan dan UMKM di Kawasan Wisata Super Prioritas (KSPN) Labuan Bajo.

Pemberdayaan adalah sebagai proses, serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sehingga indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa aspek, keadaan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM di wilayah wisata KSPN Labuan Bajo sebagai berikut yaitu:

a. Permodalan

Menurut narasumber ibu Latifah (jenis UMKM Indolatifa oleh - oleh makanan khas Labuan Bajo)

“Permodalan tidak dibantu pemda, tetapi ada skema pinjaman ringan dari BRI. Awal modal usaha satu juta, omset sebulan tergantung karna beliau mengharapkan tamu-tamu yang hadir. Rata-rata omset 20jt perbulan, sebelum pandemi covid rata-rata omset bisa 30jt. Produksinya kini mulai naik lagi semenjak pandemi awal. Saat pandemi pemerintah ,yaitu Bank BRI memberikan bantuan 2,4jt selama 2x didapatkan untuk UMKM tidak perlu memasukan data karena sudah tercantum”.

Informan ibu Wati UMKM Forla tenun menyampaikan hal serupa “Tidak ada bantuan secara finansial atau segi bangunan dari pemerintah daerah atau biaya sendiri, tetapi di fasilitasi oleh pemerintah untuk bermitra dengan bank BRI untuk mendapatkan dana KUR”.

Informan Bastian UMKM souvenir resin mengatakan “Modal sendiri, jadi fasilitas nya dari diri sendiri. Pengelolaan dana yang kerja saya sendiri dan produksi sendiri masih berada di rekening saya pribadi”.

Permodalan UMKM menurut informan bu Yeni – Haybajo usaha tenun “ modal sendiri secara pribadi atau secara personal? Itu saya belum dapat bantuan secara finansial jadi permodalan saya dilakukan sendiri, mungkin UMKM yang lain sudah ada, karna mereka lebih lama daripada saya”.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



Dapat disimpulkan pelaku UMKM ini secara umum modal pribadi, belum ada bantuan modal dari pemerintah. Yang ada bantuan modal skema KUR dari BRI.

b. Peran pemerintah

Pemerintah daerah kabuapten Manggarai Barat di bawah Perumda Bidadari melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Akan tetapi hanya 40 pelaku UMKM yang dibina, hal ini karena keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki Perumda Bidadari.

Menurut narasumber ibu Latifah

“Di masa pandemi ini kebanyakan usaha menurun, akan tetapi pelaku UMKM tetap berjalan dengan baik dan dibantu oleh pemda dan di bimbing oleh pemda serta di promosikan dengan baik di tempat oleh-oleh, dan lokal, dan ada juga yang datang langsung ke rumah. Jadi pemda sangat membantu usaha pelaku UMKM. Untuk anak muda sangat dibantu ilmunya, mereka datang dan dikumpulkan. Dari tahun 2015 penjualan hanya di Labuan Bajo dan dibantu oleh dinas. Sering mengikuti pameran supaya produk-produknya dikenal. Baru satu tahun usaha ini di bantu oleh Perumda Bidadari dan sebelumnya dikelola sendiri. Ada bantuan pembinaan, ada bantuan dari Kemenparekraf diberikan kemasan produk sebanyak 1000 lembar. Melalui seleksi untuk mendapatkan bantuan dari Kemenparekraf. Desain langsung dari kemenparekraf. Kemasannya pesan dari luar daerah dan harus minimal pesan 1000 lembar”.

Informan lain ibu Wati UMKM Forla tenun menyampaikan

“Memiliki kelompok binaan, yang sudah di bina oleh pemerintah yang bermitra sehingga lebih mudah untuk membuat produk sesuai dengan keinginan konsumen tentunya dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Kelompoknya itu ada di Kab. Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Untuk di Manggarai Barat ada 7 kelompok tenun. Satu kelompok itu terdiri dari 20-25 orang. Untuk kelompok bidang anyaman mulai dari anak SD, SMP, dan ibu-ibu kelompok yang aktif dan produksi setiap bulan diatas 50 topi anyaman”.

Informan Bastian souvenir resin *“Dulu pernah ada kendala di dinas dalam perizinan. Pemerintah pusat yaitu Kemenparekrat pernah membantu, tapi kalau pemerintah daerah belum pernah”.*

Kalau peran pemerintah menurut bu Yeni UMKM Tenun Haybajo



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



“Mendirikan UMKM itu usaha kecil menengah, peran pemerintah itu membantu mendirikan UMKM contohnya NIB sejenis dari segi perizinannya dibantu oleh kelas online dimana kita dibantu membuat NIB secara gratis”

UMKM makanan kantin Aqila di dirikan sejak 5 tahun dari tahun 2016. Hanya dilakukan di tempat saja tidak dilakukan melalui media lain, karena sudah memiliki pelanggan tetap.

“Selama ini belum pernah ada, memang dulu pernah ada dan sudah pernah masuk berkas tetapi sampai saat ini belum dapat, alasannya karena kartu keluarga masih satu keluarga dengan orang tua di kampung. Semenjak covid 2020 lalu hingga saat ini belum pernah dapat bantuan sama sekali, tetapi separuh teman-teman disini ada yang dapat bantuan dari daerah berupa uang tunai Rp 1.800.000 setelah itu datang dari pemerintah provinsi/pusat sebesar Rp 1.400.000 yang diberikan setiap bulannya. Tetapi untuk sampai saat ini kantin Aqila belum pernah mendapat bantuan”.

Dapat disimpulkan pemerintah pusat, yaitu Kemeparekraf sudah berperan melakukan pendampingan dan bantuan nyata berupa bantuan kemasan produk dan pameran. Begitu juga pemerintah daerah khususnya Perumda Bidadari sudah melakukan pendampingan, UMKM, tetapi belum maksimal karena keterbatasan anggaran maupun SDM yang dimiliki.

c. Distribusi

Menurut ibu Latifah *“Dari tahun 2015 penjualan hanya di Labuan Bajo dan dibantu oleh dinas dinas dan sering mengikuti pameran supaya produk produknya dikenal”.*

Informan lain ibu Ibu Wati Onto UMKM Forla vivian centra tenun ikat

“Untuk penjualannya, ada online, promosi dari tamu-tamu yang pernah berkunjung kesini dengan strategi membagikan kartu nama karna jauh lebih cepat proses promosinya”. Untuk omset di galeri selama pandemi ada pengurangan pada awal tahun 2020. Awal tahun 2021 sudah stabil kembali. Pemasaran melalui akun media sosial sendiri dan promosi dari orang yang pernah berkunjung kesini, karena toko souvenir di Labuan bajo sendiri bervariasi. Kalau disini harga karena langsung dari penenun jadi harganya lebih murah, dan harganya mulai Rp.500 ribu. Pemasaran juga bekerja sama dengan Ibu Gubernur NTT, saya menjadi supplier untuk dibawa ke butik”.

Informan Bastian UMKM souvenir resin mengatakan *“Penghasilannya lebih banyak penjualan langsung daripada online. Untuk masuk ke online shop itu belum berani dan cocok karena harus siap dulu, karena jual brand lokal, agak ragu untuk masuk ke online shop. Beberapa kali diajak Kemeparekraf dan pemerintah ikut pameran dan omset penjualannya menjadi lebih tinggi”.*



Gambar 1:

Peneliti dengan Indolatifa UMKM oleh-oleh Makanan Labuan Bajo



Sumber : penelitian 2022

Menurut bu Yeni UMKM tenun *Haybajo* “Distribusi mengirim barang pengirimannya jadi market paling besar dari Surabaya, Bali, Jakarta, Bandung. Harga kami cukup mahal ongkos pengirimannya, biasanya dalam kota ke kota sekitar 9rb sampai 20rb. Sedangkan dari Labuan Bajo ke Surabaya, Bali itu mulai dari 56rb sampai 70rb. Sedangkan harga produk kami diminati banyak orang. Kami berharap pemerintah membantu untuk menenkankan harga pengiriman”.

Ibu Yeni UMKM tenun *Heybajo* menyampaikan “Penjualan online atau offline, fluktuaktif. Pameran yang bagus omset luar biasa meningkat jadi 2 kali. Untuk pemberdayaan SDM sudah ada. Pemberdayaan ekomoni secara ekonomi finansial masyarakat sangat terbantu, karena ada dikampung jadi ketika mereka membuat kain hanya lembaran. Kain tenun ini hanya digunakan untuk acara adat, masyarkat berpikir tenun itu dipotong-potong dan dibuat produk lain”.

Kantin Aqila mengatakan “Pendapatan yang di dapat tidak tentu kadang untung dan kadang rugi karena terkadang ada patroli yang dilakukan pada malam hari dan kadang di siang hari selama masa PPKM ini. Saat masa sebelum pandemi, anak sekolah disediakan kopi dan kue tetapi sekarang karena anak sekolah libur yang disediakan hanya nasi. Labuan Bajo dikenal dengan pariwisatanya, usaha kantin ini hanya untuk masyarakat saja seperti ojek, sopir. Untuk wisatawan jarang datang kesini. Belum ada kontribusi pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha ini”.



Dapat disimpulkan untuk distribusi sebagian besar dilakukan sendiri. Ada bantuan dari pemerintah pusat Kemenparekraf dan Dinas daerah berupa ikut serta pameran-pameran sehingga membantu promosi UMKM Labuan Bajo. Untuk UMKM kain tenun sudah diberdayakan masyarakat kampung sebagai penenun. Untuk UMKM makanan belum berdampak karena hanya untuk masyarakat lokal.

d. SDM

Informan Bastian jenis UMKM souvenir Labura artinya Labuan Bajo Rasin art. Produk terbuat dari rasin dan dipadukan dengan kayu unik, dan handmade. *“Untuk pelatihannya saya juga siap untuk melatih di media sosial saya dan gratis, karena berjualan sekedar hobby saja, dan hanya dijual saja bagi siapa saja yg mau, tetapi awalnya harus punya hobby dulu, karena kalau punya hobby pasti hasilnya bagus. Pembuatan memanfaatkan bahan bahan yang gampang didapat dan memanfaatkan lingkungan sekitar menggunakan kayu sisa, dan untuk rasin nya sendiri stok nya masih ada, dan rasin nya bukan punya pengrajin tetapi rasin kapal, ada juga rasin khusus scrub dan belum ada di Labuan Bajo. Harus lebih giat lagi aktif dalam pelatihan, dan harus banyak baca dan bertanya dari sosial media. Tentu sangat senang bila ada pelatihan. Ada yang berkunjung ke rumah dari Sahabat Banjar, mereka melihat langsung cara membuatnya souvenir rasin ini. Untuk masyarakat belum menerima manfaat dari UMKM souvenir rasin ini. Masyarakat sekitar belum paham membuat souvenir rasin ini, tetapi saya belum menyerah dan mengkampanyekan dan intinya saya harus bertanggung jawab mempromosikan Labuan bajo dengan cara saya sendiri”.*

Gambar 2

UMKM Sovenir Resin



Sumber : penelitian 2022



Mengenai SDM usaha UKM tenun bu Yeni Heybajo mengatakan “SDM usaha tenun ini tidak dibedakan, memang bisnis tapi tidak bisnis ukuran kecil. Staf adalah teman teman disabilitas tuna rungu wicara, lulusan SMA. Tidak karyawan S1, semuanya SMA.”

Dapat disimpulkan SDM yang dimiliki pelaku UMKM ini terbatas lingkungan sendiri atau keluarga dengan latar belakang pendidikan maksimal SMA. Khusus tenun Heybajo melibatkan lulusan SMA dan penyandang disabilitas tuna rungu wicara.

Gambar 3

Haybajo kelompok tenun Bajo.



Sumber : penelitian 2022

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain:

1. Pemerintah baik pusat yaitu Kemenkoparekraf dan Pemerintah daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan UKM, Kab. Manggarai Barat melalui Perumda Bidadari telah melakukan upaya Pemberdayaan pengembangan UKM Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah wisata KSPN akan tetapi belum maksimal dikarenakan jumlah UMKM yang dibantu hanya sedikit. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan SDM di pemerintah.



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](#)

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan UKM di Kota Labuan Bajo meliputi aspek : permodalan, pendampingan, distribusi pemasaran, aspek keuangan, dan sumber daya manusia. Pelaku UKM harus memiliki kecukupan, agar usaha yang mereka kelola mampu berkembang dan bersaing dengan usaha lain dan memberikan manfaat kepada masyarakat local wilayah wisata KSPN Labuan Bajo.
3. Kendala utama pemerintah dalam melaksanakan pembinaan UKM adalah pada masalah anggaran. Pemerintah menggantungkan semua kebutuhan anggaran pada APBD, sehingga program-program pelatihan dan pembinaan harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pemerintah kabupaten Manggarai Barat .

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada pemberdayaan UMKM oleh Perumda Bidadari agar tetap diberikan yang tidak hanya pada situasi pandemi covid-19 saja. Karena faktor utama untuk dapat mendorong UMKM dapat tetap diberdayakan dalam usaha mereka dan dapat meningkatkan penghasilan mereka dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat.

Diperlukan adanya Penambahan SDM dalam mengawasi kegiatan Program Pengembangan UMKM, supaya dapat mendampingi dan membina program bisa tersampaikan kepada pelaku usaha. Rekomendasi kebijakan untuk pengembangan UMKM di Kota Labuan Bajo, yakni meningkatkan peranan dari Dinas Koperasi dan UMKM melalui dua peran tambahan, yaitu:

- a. Pembinaan dan edukasi kepada UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk berjualan Online.
- b. Kebijakan satu pintu untuk UMKM yaitu hanya melalui Dinas Koperasi dan UMKM
- c. Sistem satu basis data dan tambahan verifikasi data dengan survei lapangan secara berkala.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

[ISSN \(Online\) 2964-8769](#)

E-ISSN : 2964-8769
RES PUBLICA
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES



DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin, Aziz, H., Inten, D. N., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *International Journal of Community Service Learning*, IV(4), 321-331.
- Agustina Eka PUTRI ,2020, COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE DEVELOPMENT OF MANGROVE TOURISM IN BATU KARAS OF PANGANDARAN, WEST JAVA , *GeoJournal of Tourism and Geosites* Year XIII, vol. 31, no. 3, 2020, p.972-978 ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817
- Anharudin, Fernando, D., Saefudin, Susandi, D., & Dwiyatno, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, XIX(2), 141-149.
- Daulay, Z. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, I(2), 1-22.
- Despica, R. (2018). Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Spasial*, III(5), 39-43.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero, 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*. Terjemahan Sastrawan Manullang, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulina, A., & Dewi, M. P. (2020). Innovation Strategy of Small Medium Enterprise (SME) Through Public-Private Partnership in Depok City. *Bijak*, 17(230-235), 230-235. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/1012/pdf>
- Nur faidatimu, muhammad khozin2 gerrykaton mahendra3 , 2021, Community Empowerment Program Model for MSMEs' Actors Affected by Covid-19 in Special Region of Yogyakarta *jurnal studi pemerintahan* .-vol 12 no 2 Juli 2021
- Tulus Tambunan,2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES.
- Wibowo, F. S., Harapan, A. D., Damanik, D., & Nurhidayati, H. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Agrowisata Belimbing Dewa di Kelurahan Pasir Putih Depok Jawa Barat. *Tourism Scientific Journal*, 61-84.